

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah didasarkan asas otonomi daerah dengan mengacu pada kondisi dan situasi satuan wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian daerah tidak saja mengurus rumah tangganya sendiri tetapi juga menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah pusat di daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan dan penerapan otonomi daerah menuntut pemerintah kabupaten untuk membiayai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawabnya (Kuncoro, 2004:47). Hal ini menandakan bahwa daerah harus berusaha untuk mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan tolak ukur bagi daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah yang bersumber

dari daerah itu sendiri dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing–masing daerah.

Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan suatu usaha daerah yang digunakan untuk memperkecil ketergantungan pemerintah daerah atas pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah menjadi bagian keuangan utama bagi pemerintah daerah yang perlu terus ditingkatkan agar penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan lancar sehingga daerah secara bertahap dan berangsur-angsur dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat serta dapat menjadi daerah mandiri yang mampu untuk membiayai pembangunan daerah.

Salah satu penerimaan daerah adalah pajak reklame yang merupakan bagian dari pajak daerah. Pajak reklame adalah pungutan yang dikenakan terhadap penyelenggaraan reklame (Siahaan, 2005). Pajak reklame dikenakan dengan alasan bahwa reklame dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan didengarkan dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Pajak reklame merupakan pajak daerah yang merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah (Prakosa, 2005). Pemberian beban bagi wajib pajak reklame memang bukan semata-mata karena meningkatkan kebutuhan dana untuk pembangunan saja, tetapi juga disebabkan sifat pajak reklame sebagai pajak objektif yang dasar

pengenaannya adalah nilai sewa reklame (NSR). NSR yang diperhatikan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis reklame, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame (Sunarto, 2005). Total realisasi pajak reklame dan pendapatan asli daerah Kota Kupang selama tahun 2009 - 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Total Realisasi Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang
Tahun 2009 - 2013

Tahun	Total Realisasi (Rp)		%
	Pajak Reklame	PAD	
2009	582.575.852	36.204.733.167	1,61
2010	819.134.369	36.828.891.454	2,23
2011	940.458.832	47.702.927.427	1,98
2012	1.179.185.453	66.068.087.201	1,79
2013	1.287.491.279	80.755.471.988	1,60
	Rata - Rata		1,85

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang, 2014

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama periode tahun 2009 – 2013 total realisasi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang mengalami fluktuasi. Pencapaian realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 2,23% dan terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 1,60%.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu dianalisis **“KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KUPANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dilihat dari uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah ;

1. Seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang tahun 2009-2013 ?
2. Faktor penghambat apa saja yang dihadapi serta solusi yang ditempuh oleh pemerintah daerah Kota Kupang dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame ?
3. Faktor pendukung apa saja yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Kupang dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ;

1. Besarnya kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang tahun 2009-2013.
2. Faktor penghambat dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Kupang dalam meningkatkan pajak reklame.
3. Faktor pendukung yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Kupang dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan ini yakni :

1. Referensi bagi pihak-pihak seperti Dinas Pendapatan Daerah dalam menentukan kebijakan-kebijakan guna meningkatkan penerimaan pajak reklame.
2. Secara akademis, dapat diharapkan sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang

Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.

3. Secara praktis, diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan khususnya pemerintah daerah Kota Kupang dalam menentukan arah dan strategi kebijakan dimasa mendatang serta sebagai bahan evaluasi bagi perencanaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
4. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan.